HARIAN UMUM NusaBali

4 Pos Pajak Nol Target Terpasang di APBD 2015

AMLAPURA, NusaBali

Empat pos pajak dengan target nol, di APBD Karangasem 2015, tetap terpasang. Padahal potensinya tidak ada, walau didukung peraturan daerah (perda) masing-masing. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Karangasem I Nengah Toya mengatakan, pajak tanpa potensi tetap saja bisa terpasang, karena telah ada perda.

Toya mengaku, sulit menghapus, agar target pajak tersebut tidak tercantum di APBD. Sehingga di setiap APBD selalu muncul walau tanpa target. Toya membeberkan hal itu di Amlapura, Jumat (18/9).

Toya mengatakan empat pos pajak dengan target nol, masing-masing: pajak reklame stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan dan pajak sarang burung walet.

Pajak reklame sesuai Perda No 12 tahun 2008, dan pajak sarang burung walet sesuai Perda No 04 tahun 2011. "Kami kan mewarisi seperti itu, keempat pajak diatur perda, kenyataannya tidak ada potensi. Hanya saja, di APBD tetap tercantum tidak bisa terhapus," katanya.

Sebab, selama ini kata Toya tidak ada transaksi sarang burung walet, lagi pula di Amlapura sendiri tidak ada burung walet yang bersarang. Hanya ada di Banjar Tauka, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang dan di Pantai Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem.

"Karena tidak ada potensi tidak ada pemasukan, sehingga tidak ada target," katanya.

Padahal target PAD di APBD Perubahan 2015, mengalami kenaikan dari Rp 205,27 miliar di APBD induk menjadi Rp 232,13 miliar, kenaikannya Rp 26,85 miliar atau 13,08 persen.

Toya mengakui, kenaikan target berdasarkan hitung-hitungan potensi. "Ya, kami jalani saja untuk memenuhi target itu, walau terasa cukup berat," tambahnya. **k16**

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 8

HARIAN UMUM NusaBali

APBD Perubahan 2015 Baru Masuk Pembahasan Banggar

MANGUPURA, NusaBali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung mulai membahas hasil verifikasi maupun evaluasi APBD Perubahan tahun 2015, Jumat (18/9). Rapat dipimpin oleh Koordinator Banggar yang juga Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta, dihadiri antara lain Ketua Komisi III Nyoman Satria, Ketua Komisi II Nyoman Dirgayusa, serta tim ahli DPRD.

Lamanya pembahasan APBD perubahan ini lantaran SK dari Gubernur Bali baru diterima dewan pada 16 September 2015. Banyak pihak menilai waktu yang tersedia untuk menjalankan program yang dicanangkan sangat sempit, hanya berkisar 2,5 bulan hingga pertengahan Desember. Sehingga dikhawatirkan akan mengganjal pelaksanaan proyek. Meski ada kekhawatiran seperti itu, wakil rakyat usai membahas APBD Perubahan 2015 tersebut menjelaskan, walaupun hingga saat ini APBD perubahan belum ketok palu, tetapi pihaknya memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target.

Menurut Sunarta, program yang dianggarkan pada APBD perubahan lebih banyak adalah program yang tak langsung berkaitan dengan kegiatan fisik. Melainkan program kecil yang tidak membutuhkan waktu pengadaan lama, seperti penyusunan detail engineering design (DED) maupun proyek-proyek seperti pengadaan dalam volume dan nilai yang kecil. Misalnya pengadaan alat tulis kantor, mebeler, dan sebagainya.

"Kegiatan yang dipasang di APBD perubahan hanya proyek-proyek kecil yang tidak perlu waktu lama," katanya. Sehingga, imbuh Sunarta yang juga Bendesa Adat Abianbase, Kelurahan Kapal, Mengwi, itu menegaskan walau waktunya mepet, dipastikan proyek takkan terganggu.

Sunarta juga memastikan, pihak DPRD Badung tak ada menghambat pembahasan APBD Perubahan 2015. Namun, DPRD baru menerima hasil verifikasi 16 September. Setelah rapat Banggar, rencananya rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan digelar pada Selasa (22/9) mendatang.

Disinggung hal penting yang perlu dikoordinasikan dengan pihak TAPD, Sunarta menjelaskan antara lain soal hibah bansos yang hingga kini belum ada kejelasan. "Materi hibah bansos ini akan menjadi bahan pertanyaan dewan," katanya. Terkait ini, tentu saja menyangkut nasib dana hibah dan bansos yang merupakan kepentingan masyarakat. Pihaknya pun akan mempertanyakan alternatif jika belum bisa keluar karena penerima belum berbadan hukum Indonesia. Ketua Komisi III Nyoman Satria mengharapkan agar anggota banggar bisa memperdalam dan mempelajari materi APBD perubahan tersebut. Sehingga bisa menjadi bahan untuk dikomunikasikan dengan pihak TAPD. **as**

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Fasilitas Kolam Renang Rusak

Satpol PP Disiagakan Jaga Ketat

Kerusakan di beberapa bagian kolam renang itu akan segera diperbaiki. Namun masih menunggu kepastian pengelola kedepannya.

SINGARAJA, NusaBali

Pasca kerusakan beberapa fasilitas yang terjadi di venue cabang olahraga renang, setelah pelaksanaan Porprov XII, tahun 2015, di Buleleng, Wakil Bupati, dr Nyoman Sutjidra meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kembali melakukan penjagaan yang ketat. Hal tersebut, menyusul dibukanya kolam renang standar nasional tersebut untuk masyarakat umum.

Selain ditemukan kerusakan di beberapa fasilitas kolam renang, seperti kerusakan gagang pintu pada ruang ganti, pagar pembatas dan warna air yang keruh, sejumlah celana dalam juga ditemukan berserakan di di dekat ruang ganti. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti indikasi menjadi tempat mesum, puluhan Satpol PP langsung disiagakan sejak Kamis (17/9) malam.

"Terkait dengan temuan kerusakan dan beberapa benda yang seharusnya tidak ada disana, kami langsung tugaskan Satpol PP untuk melakukan penjagaan kembali di lokasi. Ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Mengingat saat ini fasilitas olahraga kolam renang, setelah Porprov, sudah dibuka untuk umum," ujar Wakil Bupati Buleleng, dr Nyoman Sutjidra, SpOG, dikonfirmasi Jumat (18/9) kemarin.

Terkait dengan kerusakan beberapa fasilitas kolam renang, dikatakan akan segera diperbaiki. Hanya saja saat ini masih menunggu kepastian pengelola kolam renang untuk kedepannya. "Karena biaya pembangunannya cukup menguras anggaran. Kedepannya kolam renang ini akan kita berdayakan, perlu pengelolaan yang matang, sehingga nantinya tidak terbengkalai. Yang jelas kerusakan yang sudah terjadi nanti akan kita perbaiki segera, setelah pengelola kolam renang ini diputuskan," imbuh dia.

Selain itu Sutjidra mengaku, saat ini Pemkab Buleleng memberikan keleluasaan kepada siswa, mahasiswa untuk memanfaatkan fasilitas kolam renang yang sudah ada. Pihaknya juga akan mengatur sistem pemeliharaan kolam renang, yang saampai saat ini masih belum sempurna terutama untuk parkir dan perindang. Termasuk memikirkan biaya operasional setiap bulannya yang cukup tinggi.

Sementara itu pemberdayaan kolam renang berstandar nasional yang baru dimiliki oleh Buleleng tersebut, juga akan direncanakan dipakai untuk even-even renang nasional. Seperti misalnya yang baru direncanakan adalah pelaksanaan Kejurnas pada bulan November mendatang. "Ya mudah-mudahan tidak ada halangan, pemanfaatan kedepannya akan kita pakai untuk even-even besar berstandar nasional," harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, belum genap sepekan dalam pertandingan cabang olahraga renang yang digelar dalam ajang bergengsi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XII, di Buleleng, beberapa fasilitas di kolam renang mengalami kerusakan. Seperti yang terlihat pada pintu ruang ganti putra yang gagangnya sudah lenyap. Begitu pula pada pagar pembatas sisi kolam renag yang sudah ambruk.

Namun sampai saat ini belum dapat dipastikan penyebab kerusakan tersebut apakah terjadi saat pelaksanaan Porprov atau setelah Porprov. Selain juga air kolam yang sudah berubah warna menjadi hijau. k23

• NUJSABALI/LILIK

Wakil Bupati Buleleng, dr Nyoman Sutjidra, SpOG.

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM
NusaBali

Kisruh Honor Kelar, Pilkada Bangli Tetap Jalan

• NUSABALI/DEWA

SUASANA saat pertmuan pemabahasan honor Pilkada Bangli, di Rumah Jabatan Bupati Bangli, Jumat (18/9).

BANGLI, NusaBali

Ingin menanyakan titik terang honor penyelenggara Pilkada Bangli, Ketua Panwaslih Bangli I Nengah Sandiartha bersama Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panwascam seluruh Kabupaten Bangli mendatangi Rumah Jabatan Bupati Bangli, Jumat (18/09).

Kedatangan mereka diterima langsung Penjabat Bupati Bangli, Dewa Gede Mahendra Putra, didampingi Kabag Hukum, Kabag Keuangan, Assisten III, Kesbangpolinmas dan Kabag Humas Pemkab Bangli.

Dalam pertemuan itu, akhirnya menemukan titik terang, sebab sesuai dengan SK Provinsi Bali No : 270.5/8070/HK tentang standar harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah yang salah satu klausulnya mencabut SK Bupati Bangli No.900 tahun 2015 yang menetapkan honor penyelenggara Pemilu Rp 2.500.000 untuk Ketua dan Rp 2.000.000 untuk anggota. Dalam surat tersebut, juga ditetapkan honor penyelenggara pemilu dikembalikan sesuai usulan KPU dan Panwaslih sebelumnya.

Sehingga, honor yang diberikan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 6,5 juta untuk ketua dan untuk anggota sebesar Rp 5,5 juta, sama dengan enam kabupaten/kota di Bali yang menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

Penjabat Bupati Bangli langsung menyampaikan bahwa dasar hukum sekarang sudah jelas, menyusul turunnya SK Provinsi Bali tersebut. "Surat dari Provinsi tersebut, sudah saya jemput tadi pagi (Jumat) langsung ke Denpasar. Jadi dasar hukumnya kini sudah jelas," ujarnya.

Kata Dewa Mahendra, sesuai dengan SK tersebut, honor untuk penyelenggara Pemilu di Bangli dikembalikan sesuai usulan KPU dan Panwaslih Bangli sebelumnya. Bahkan saat itu juga, Pj Bupati Bangli langsung menginstruksikan kepada bawahannya agar mempercepat proses pembuatan SK pencabutan tersebut. "Maksimal pada Rabu (23/9) nanti, prosesnya sudah kelar. Kalau bisa maju bakal lebih baik," katanya.

Sementara, Ketua Panwaslih Bangli, Nengah Sandiartha langsung menyambut penyelesaian kisruh honor tersebut, agar diselesaikan dengan baik. "Kini kejelasannya sudah ada. Bupati juga telah menjamin, pada Rabu nanti SK Bupati yang baru turun untuk mencabut SK Bupati sebelumnya. Jadi, kami optimis pemilu di Bangli dapat berjalan sesuai dengan aturan," ujarnya. cr53

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 16

HARIAN UMUM NusaBali

Masih Terlilit Kasus, GOR Sekolah Malah Dipoles

BANGLI, NusaBali

Walaupun pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli tengah melakukan penyidikan mengenai dugaan adanya penyimpangan dalam proses pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) di SMAN I Susut, Bangli, pihak sekolah bergeming.

Malah pihak komite sekolah melakukan pemolesan atau renovasi GOR tersebut. Mereka beralasan proses renovasi terhadap banguan GOR yang menelan anggaran miliaran itu, dilakukan setelah mendapat izin dari pihak Kejari.

Kepala SMAN I Susut, Drs Komang Gede Juliarta Danendra Mpd, saat dikonfirmasi mengatakan, sebelum melakukan semacam renovasi, pihaknya meminta petunjuk pada Kejari Bangli supaya dapat memfungsikan bangunan GOR yang telah lama mengganggur itu. "Setelah melakukan kordinasi, intinya kita diperkenankan untuk menservis GOR tersebut, dengan catatan tidak membebani dari dana sekolah," ujarnya, Kamis (17/9).

Kata dia, kondisi GOR yang telah lama menganggur ini, memang seringkali menjadi hambatan di saat sekolah mengikuti berbagai lomba. Seperti saat mengikuti lomba sekolah sehat, pusat informasi konsultasi remaja (PIK-R) dan sebagainya. Sebab, hal itu malah menjadi nilai minus bagi sekolah.

"Apalagi kita bakal mengikuti lomba sekolah sehat yang penilaiannya bakal dilakukan bulan ini. Maka GOR tersebut dipoles agar tidak kembali mendapat nilai minus. Adapun beberapa item banguan yang diperabaiki, seperti melakukan pemadatan lantai dengan beton, pengecatan tembok di dalam ruangan GOR dan penataan stage," katanya.

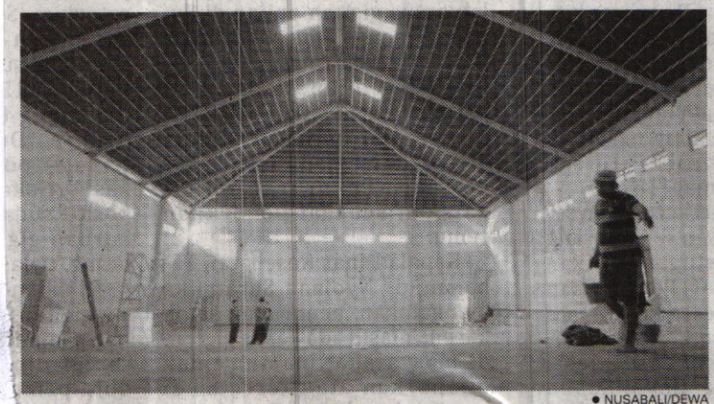

• NUSABALI/DEWA

KONDISI GOR SMAN 1 Susut, saat dipoles oleh sejumlah buruh bangunan, Kamis (17/9).

Rencananya GOR itu, bakal difungsikan sebagai lapangan basket, bulutangkis dan voli serta difungsikan juga sebagai tempat pertemuan. "Untuk renovasi penyervisan itu, dianggarakan dana sekitar Rp 45-50 juta yang menggunakan dari dana komite sekolah," sebutnya.

Sementara Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bangli, Bagus Putra Agung, seizin Kajari Bangli, saat dikonfirmasi terkait penanganan kasus GOR di SMKN1 Susut, menegaskan tetap akan membukanya lagi. Pasalnya, penanganan kasus itu dilakukan pada pejabat sebelumnya.

"Kita bakal kembali membuka lagi kasus tersebut dan sebelumnya kasus ini tengah masuk pra ekspose di BPKP," ujarnya. Lucunya, saat disinggung soal adanya penggarapan GOR tersebut oleh pihak sekolah, dia pun tampak kaget. Dia malah mempertanyakan kebenaran itu pada awak media. Menurut dia, semestinya GOR itu kalau masih berkasus sebaiknya jangan diotak-atik dulu. cr53

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 8

HARIAN UMUM NusaBali

Mikol Kembali Diatur Pemda

Pengaturan lokasi mikol yang diperdagangkan adalah dijual eceran atau diminum langsung itu dikembalikan pada Pemda.

JAKARTA, NusaBali

Kementerian Perdagangan bakal mengubah 32 aturan seperti yang tercantum dalam paket kebijakan yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 9 September 2015. Salah satu aturan yang akan ditinjau kembali adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (mikol), yang merupakan perubahan dari Permendag Nomor 20 tahun 2014.

Nantinya, pemerintah bakal menyerahkan kewenangan penjualan minuman beralkohol (mikol) atau miras (minuman keras) ke pemerintah daerah (pemda). "Mikol jadi sebetulnya kalau kita pahami dulu bahwa deregulasi birokratisasi dalam rangka meningkatkan daya saing dan mendorong perdagangan dan beberapa hal mendorong sektor riil terus melaju," papar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (18/9).

Srie menjelaskan, salah satu permintaan dalam paket kebijakan Jokowi adalah bagaimana untuk penetapan pengaturan lokasi mikol yang diperdagangkan adalah dijual eceran atau diminum langsung itu dikembalikan pada Pemda. "Itu usulan di rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas)," sebutnya.

Pihaknya mengaku tengah mempelajari kembali Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang merupakan perubahan dari Permendag Nomor 20 tahun 2014.

Namun sebenarnya, Srie bilang, dalam Permendag Nomor 20 tahun 2014 aturan mengenai penjualan mikol secara eceran di toko sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Tepatnya, aturan tersebut ada pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa penjualan langsung di bar, hotel ataupun restoran ditetapkan pemda. "Kemudian Permendag 06 melarang (penjualan) di minimarket. Pasal yang diubah di minimarket. Kita tegaskan ke Pemda bahwa ada tempat tertentu menjual di tempat yang ditetapkan pemda," kata Srie lagi.

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 11

HARIAN UMUM NusaBali

Mobnas Pimpinan Dewan Jarang Terpakai

MANGUPURA, NusaBali

Mobil dinas (mobnas) pimpinan DPRD Badung yang telah mengundurkan diri karena menjadi calon dalam Pilkada Badung 2015, kini hanya diparkir di gedung DPRD Badung. Misalnya, kendaraan Toyota Camry dan Fortuner bernomor polisi DK 3 Q milik I Nyoman Giri Prasta tak lagi dipergunakan kecuali untuk kepentingan kedinasan. Kini politisi asal Plaga, Petang, yang menjadi calon bupati di Pilkada Badung 2015 itu lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Secara aturan fasilitas termasuk juga gaji sebagai anggota dewan akan tetap menjadi hak sebelum SK pengunduran diri turun. Namun, karena bersamaan dengan pengajuan permohonan pengunduran diri sedang diproses, tiga anggota dewan yang mundur karena bertarung dalam Pilkada Badung, 9 Desember 2015, bertepatan dengan masa kampanye, sehingga baik Giri Prasta maupun I Ketut Suiasa selaku pendamping (pasasangan calon Giri-Asa), serta I Nyoman Sutrisno menjadi calon wakil bupati yang berpasangan dengan calon bupati I Made Sudiana (pasangan calon Sudiana-Sutrisno), maka terlarang bagi mereka menggunakan fasilitas negara.

Humas tim pemenangan Giri-Asa, Nyoman Satria, saat dikonfirmasi membenarkan semenjak dibukanya kampanye 27 Agustus 2015, baik Giri Prasta maupun Suiasa tak lagi menggunakan mobil dinas sebagai pimpinan dewan. Bahkan, mobil dinas itu kini telah dikembalikan sekitar sepekan lalu.

"Walaupun masih punya hak, Giri Prasta sudah mengembalikan seluruh fasilitas terhitung sejak satu minggu lalu. Ke mana-mana (Giri Prasta) menggunakan mobil pribadi. Jadi itulah konsekuensi sebagai bentuk komitmen untuk mengembalikan mobil dinas itu, walaupun masih memiliki hak menggunakan fasilitas itu sampai SK gubernur turun," jelasnya, Jumat (19/8).

Tidak saja kendaraan dinas Giri Prasta, kata Satria,, kendaraan dinas yang dipakai Suiasa pun tak lagi digunakan. Akan tetapi, untuk pengembalinnya ke lembaga dewan masih akan dikoordinasi lebih lanjut. "Pengembaliannya kami masih koordinasikan, tapi kami tegaskan di sini, Pak Suiasa juga tak lagi menggunakan mobil dinas saat mengikuti kegiatan kampanye," tegasnya.

Sementara, Sekretaris DPRD (Sekwan) Badung Made Wira Dharmajaya, menjelaskan aturan masih membolehkan fasilitas dinas digunakan sebelum SK turun. Tetapi fasilitas dinas dilarang digunakan bila untuk kepentingan kampanye. "Sepanjang tidak pakai untuk kampanye, pak Giri, pak Suiasa, tetap boleh menggunakan modil dinas. Seperti bila ada kegiatan kedinasan mereka tetap boleh memakai mobil dinas. Namun kalau sudah urusan kampanye, nah itu yang tidak boleh," jelasnya. Ia pun membenarkan bila kendaraan dinas Giri Prasta kini hanya terparkir di gedung dewan. as

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Penetapan Tersangka Korupsi PDAM Karangasem Ditunda

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi di PDAM Karangasem yang rencananya tinggal menetapkan tersangka kembali mundur. Penyidik kembali diminta melengkapi proses penyelidikan hingga penyidikan sehingga kasus ini menjadi sempurna.

Hal ini diungkapkan salah satu Tim Penyidik Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Bali, Akmal Kodrat didampingi Kasipenkum dan Humas, Ashari Kurniawan pada Kamis (17/9) sore. Ia mengatakan, dalam kasus ini penyidik memang sudah melakukan gelar perkara (ekspose) dan menemukan perbuatan melawan hukum. Namun sampai saat ini, penyidik belum menetapkan secara resmi tersangka. "Memang tersangka belum ditetapkan," jelasnya ketika ditemui di Kejati Bali. Ia mengatakan, ada beberapa hal yang membuat penetapan tersangka ini ditunda. Salah satunya yaitu penyimpangan yang terjadi di PDAM Karangasem hingga terjadinya kerugian negara. Dijelaskannya, awalnya penyidik melakukan penyelidikan terkait adanya penyimpangan dalam pengadaan pompa air seperti yang dilaporkan masyarakat sebelumnya.

Namun setelah dilakukan pendalaman, dalam penyelidikan tersebut tidak menemukan penyimpangan dalam pengadaan pompa air. Malah penyidik menemukan penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan lahan untuk PDAM Karangasem. "Tidak ada penyimpangan dalam pengadaan pompa seperti yang dilaporkan. Malah tim menemukan penyimpangan dalam pengadaan lahan," ungkapnya. Nah, temuan penyimpangan inilah yang kini menjadi masalah dan harus disempurnakan. Pasalnya, dalam surat perintah penyelidikan tim mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan pompa, namun setelah naik menjadi penyidikan ternyata yang ditemukan penyimpangan dalam pengadaan lahan. "Makanya sekarang tim masih melakukan penyelidikan ulang untuk disempurnakan terkait penyimpangan pengadaan lahan ini. Sehingga nantinya penyelidikan hingga penyidikan klop dan kasus ini menjadi terang," lanjutnya.

Ditanya masalah calon tersangka yang disebutkan berinisial BT, Akmal enggan berkomentar banyak. Namun ia juga tidak membantah soal calon tersangka yang disebut salah satu pejabat utama PDAM Karangasem ini. "Kita tunggu saja. Kalau semua sudah selesai akan diumumkan," pungkas Akmal. rez

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

Perda RTRW Diusulkan Revisi

Dewan akan mengeluarkan rekomendasi untuk revisi Perda RTRW. Namun Bappeda berpendapat, sebelum revisi mestinya didahului dengan evaluasi.

DENPASAR, NusaBali

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali akan direvisi. Pansus Arahan Pengaturan Zonasi (APZ) DPRD Bali telah menyepakati bahwa Perda Nomor 16 Tahun 2009 direvisi dan usulan tersebut akan diajukan ke pimpinan dewan.

Hal itu diterungkap di sela- sela rapat Pansus APZ di gedung DPRD Bali, Jumat (18/9) siang. Rapat Pansus APZ dipimpin Ketua Pansus I Kadek Diana, dihadiri Ketua Bappeda Provinsi Bali Putu Astawa, Tim Ahli Nyoman Suarca, perwakilan Biro Hukum, Koordinator Pansus APZ yang juga Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry. Sementara anggota Pansus APZ yang hadir I Nyoman Parta, I Wayan Disel Astawa, Ida Bagus Gede Udiyana, Ida Bagus Padakusuma, Ketut Kariyasa Adnyana. Sebenarnya ada 26 anggota pansus APZ DPRD Bali. Namun yang hadir mengikuti agenda pembahasan Ranperda APZ selalu minim.

Pembahasan Ranperda APZ kemarin adalah penyempurnaan pasal- pasal soal arahan zonasi yang sebelumnya sudah dibahas dengan staf ahli dan PHDI. Perda APZ mendesak untuk segera ditetapkan karena desakan kabupaten dan kota yang tidak bisa menyusun RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) lantaran zonasi-zonasi belum jelas diatur. Pansus tinggal mengagendakan pemanggilan kepala Bappeda kabupaten/kota seluruh Bali dan tim ahli sebelum Ranperda APZ disempurnakan.

Anggota Pansus I Wayan Disel Astawa mengatakan sebelum Ranperda APZ ditetapkan seluruh kepala Bappeda dan pihak kabupaten dan kota dipanggil dulu untuk membahas bersama. "Jangan sampai nanti setelah penetapan ada komplin-komplin lagi. Kita *nggak* mau lagi bolak-balik," ujar Disel Astawa.

Disel Astawa di hadapan peserta rapat mengatakan pembedahan pasal per pasal di Ranperda APZ juga tidak membahas soal ketinggian bangunan. "Seperti yang sela-

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

sambungan - - - -

ma ini bergulir di media, perlu ditegaskan bahwa di sini tidak ada pembahas soal ketinggian bangunan. Publik perlu mengetahui hal itu. Supaya tidak ada kecurigaan bahwa ketinggian bangunan akan dibahas di APZ untuk kepentingan tertentu," kata politisi PDIP asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ini.

Nah, di sela-sela pembahasan Ranperda APZ tersebut Ketua Pansus APZ Kadek Diana menyampaikan wacana revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali. Kadek Diana mengatakan Perda RTRW sudah sangat memenuhi syarat untuk direvisi. Ada beberapa hal yang mendasari. Salah satunya adanya perubahan ketentuan peraturan perundangan yang mengharuskan revisi Perda 16 Tahun 2009. Seperti adanya UU Nomor 23 tentang pemerintahan daerah yang memasukkan kewenangan provinsi dengan porsi lebih banyak. Misalkan kewenangan pengaturan garis pantai 12 mil yang kini ditangani Provinsi Bali. Kewenangan soal energi sumber daya alam seperti pengaturan masalah tambang. Selain itu, soal pengaturan tata ruang saat ini sudah harus dilakukan perubahan karena karakter Bali sekarang tidak sesuai dengan Perda RTRW. "Tata ruang kita sudah banyak mengalami perubahan sehingga perlu penyesuaian," kata mantan Sekretaris DPC PDIP Gianyar, ini.

Kata politisi asal Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ini amanat PP 15 tentang penyelenggaraan penataan ruang, Perda Tata Ruang dapat direvisi lima tahun sekali. "Kalau mengacu PP 15, ini sudah sangat dimungkinkankan untuk dilakukan revisi karena sudah berjalan tujuh tahun," ujarnya.

Mantan anggota DPRD Gianyar ini mengatakan revisi Perda RTRW tidak saling menunggu dengan penetapan Ranperda APZ. Karena Perda APZ menjadi kebutuhan masyarakat di kabupaten dan kota, dan mendesak ditetapkan.

"Tidak perlu menunggu revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali. Kalaupun nanti APZ ada penyelarasan dengan Perda RTRW maka itu bisa dilakukan dengan singkat. Tidak seperti membuat perda baru, hanya perbaikan-perbaikan untuk penyelarasan supaya tidak bertentangan dengan aturan lain," ucap Kadek Diana.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Bali Putu Astawa mengemukakan, sebelum dilaksanakan revisi terhadap Perda RTRW harus ada evaluasi. "Setahu kami sebelum ada keputusan revisi harus ada evaluasi dulu. Evaluasi itu menyangkut hal-hal yang mana saja akan direvisi, pasal per pasal. Apa latar belakang dan alasannnya. Eksekutif dan tim ahli, akademisi yang akan mengevaluasi," tutur Astawa.

Sugawa Korry yang juga koordinator Pansus APZ mengatakan DPRD Bali akan menerbitkan rekomendasi terkait dengan usulan revisi Perda RTRW. "Nanti dewan akan rekomendasikan revisi Perda 16 Tahun 2009 ini," ujarnya.

Usai pembahasan Raperda APZ, kemarin, kepada *NusaBali*, Sugawa mengatakan usulan revisi itu dibahas dulu di paripurna internal. Kalau disetujui baru diusulkan ke pimpinan untuk direkomendasikan. Jadi tergantung hasil pembahasan di internal dewan. "Kalau sudah disetujui direvisi dalam paripurna internal barulah ada rekomendasi DPRD Bali. Sekarang ini *kan* baru usulan Pansus APZ. Itu akan dibahas paripurna diinternal," ucapnya. **nat**

2

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Pilkada Buleleng Digelar Februari 2017

★ KPUD Mulai Susun Kebutuhan Dana

SINGARAJA, NusaBali

Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Buleleng, bakal dihelat pada bulan Februari tahun 2017 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) sendiri sudah mulai menyusun perkiraan kebutuhan dana pelaksanaan perhelatan politik tersebut.

KPU pun mulai berkoordinasi dengan Lembaga DPRD Buleleng, Jumat (18/9) guna bisa mengamankan kebutuhan dana yang akan diajukan nanti. Diperkirakan kebutuhan dana Pilkada itu mencapai puluhan miliar rupiah. Rombongan Komisioner KPU Buleleng yang datang ke gedung Dewan kemarin diterima langsung Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna didampingi Kabag Humas dan Perjalanan, Putra Aryana.

Dalam pertemuan itu, Komisioner KPU Buleleng menerangkan Pilkada serentak tahap dua yang diselenggarakan di tahun 2017 nanti, salah satunya diikuti oleh Kabupaten Buleleng. Diperkirakan proses Pilkada itu sudah dimulai sekitar bulan Oktober tahun 2016. Karena itu, pihaknya segera akan mengajukan usulan permohonan penggunaan dana Pilkada tersebut dalam APBD tahun 2016. "Kami sifatnya masih koordinasi saja, sebagai informasi awal saja. Meski perhelatannya masih dua tahun lagi, namun kami perlu melakukan persiapan lebih awal. Satu hal yang paling penting dibahas menyangkut kesiapan kebutuhan anggaran," terang Ketua KPU Buleleng, I Gede Suardana usai pertemuan.

Menurut Suardana, penyusun draf item penggunaan dana pilkada mengacu pada regulasi yang sudah ada seperti Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No. 51 Tahun 2015 tentang Standar Kebutuhan. Selain itu, ada pula regulasi lain yang dijadikan acuan seperti Peraturan Mentri Keuangan (PMK) dan Peraturan KPU. Sementara terkait nilai estimasi kebutuhan anggaran pilkada, pihaknya belum berani menginformasikan sebelum kebutuhan anggaran secara resmi diusulkan oleh pemerintah daerah ke lembaga dewan. "Nanti akan ada finalisasi dan kami belum sampaikan nilainya, karena nanti anggaran itu ditetapkan oleh pemerintah untuk dibahas bersama dewan," ujarnya.

● NUSABALI/SUDIRTA

KETUA DPRD Buleleng I Gede Supriata menerima rombongan komisioner KPUD Buleleng Jumat (18/9)

Sementara Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna mengatakan, berdasarkan jadwal pilkada akan dihelat pada awal tahun anggaran 2017, maka sudah sepantasnya pemeirntah mulai menyusun perencanaan anggaran yang diperlukan. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai persoalan anggaran ini menghambat tahapan pilkada yang sudah diamantkan oleh undang-undang. Untuk itu, pihaknya menyambut positif kinerja KPUD yang menyusun lebih awal item anggaran. Lembaga dewan dalam waktu dekat ini akan melakukan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah untuk membahas anggaran pilkada, sehingga begitu usulan anggarannya masuk dalam APBD Tahun 2016, maka pembahasan akan lebih cepat bisa disahkan. "Karena ini sudah diamanatkan oleh UU, jadi kami mendorong KPUD yang telah menyusun persiapan kebutuhan anggaran. Kita akan kordinasikan dulu dan begitu usulan masuk dalam APBD 2016 pembahasannya bisa optimal," tegasnya.

Ditanya perkiraan estimasi kebutuhan anggaran pilkada, politisi PDI-Perjuangan asal Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula ini mengatakan, secara keseluruhan pilkada diperkirakan memerlukan anggaran sebesar Rp 46 miliar. Dari anggaran ini rincian kebutuhan anggaranya mulai dari dana kampanye, logistik, honor-honor, sewa gudang, dan kebutuhan anggaran teknis lainnya. "Anggarannya lumayan besar dan mudah-mudahan kita bisa memenuhinya dan upaya efisiensi akan kita carikan solusinya. Seperti sewa gudang, karena pemerintah puya tempat, apa tidak bisa tidak disewa, sehingga bisa mengirit biaya," tegas Supriatna. k19

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM NusaBali

Puskesmas di Kintamani Kekurangan Dokter

BANGLI, NusaBali

Melihat langsung kondisi dan realita Puskesmas yang ada di Kabupaten Bangli, DPRD Bangli menggelar Sidak dengan menyasar sejumlah Puskesmas yang ada, Jumat (18/9). Salah satunya menyasar Puskesmas Kintamani I, yang melayani rawat inap. Diketahui ternyata Puskesmas Kintamani I malah kekurangan tenaga dokter hingga separuh dari jumlah ideal. Saat ini Puskesmas tersebut hanya diperkuat tiga dokter, padahal minimal harus tersedia enam orang dokter.

Hal itu terungkap saat rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, I Komang Carles bersama Ketua Komisi I, Wayan Wedana dan Nengah Darsana mengorek data di lokasi. Mereka diterima oleh Kepala Pukesmas Kintamani I, drg Agus Kawibawa.

I Wayan Wedana setelah turun langsung ke lokasi, menyebut pihaknya cukup terkejut karena minimnya jumlah tenaga dokter. Menurut politisi dari PKPI ini, sebagai puskesmas yang melayani rawat inap, semestinya dikaver minimal sebanyak 6 dokter umum. "Mengenai aktivitas di Puskesmas ini, memang tergolong padat, sehingga harus memperoleh perhatian lebih," ujar Wedana.

Selain masalah kekurangan tenaga dokter, Wedana juga menyinggung masalah kondisi gedung yang sangat memprihatinkan. Menurutnya di beberapa titik bangunan gedung sudah mulai rusak, seperti atap bangunan ada yang sudah jebol. "Kita juga dapat masukan bahwa peralatan medis jumlahnya juga sangat minim, bahkan untuk slop tangan saja tidak tersedia padahal fungsinya sangat penting bagi para tenaga medis," ungkap Wedana.

Maka, pihaknya mendesak Diskes untuk mengambil langkah-langkah strategis mengatasi masalah yang terjadi, baik itu masalah kekurangan dokter, minimnya perlatan dan sebagainya. "Kita mendesak pada Diskes untuk melakukan pendataan, kita di dewan pastinya bakal mendukung langkah dalam mengatasi persoalan tersebut," akunya.

Sementara, Kepala Puskesmas Kintamani I, drg Agus Kawibawa, mengatakan di samping kondisi bangunanya yang kurang terurus, memang masih kekurangan tenaga dokter. Kalau bisa terpenuhi enam dokter umum, kata dia, bakal bisa diberlakukan shift. "Rencana penempatannya dua untuk menangani rawat jalan dan sisanya untuk menangani rawat inap secara bergiliran," ujarnya. Sementara untuk tenaga bidan dan perawat telah mencukupi. cr53

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 8

HARIAN UMUM NusaBali

Warga Protes Perbaikan Jalan

● NUSABALI/NATA

RUAS jalan Takmung – Lepang di jalur Banjar Losan, Desa Takmung, Klungkung dikeluhkan warga.

Perbaikan ini aneh karena seharusnya berhotmix, namun hanya ditaburi aspal dan pasir.

SEMARAPURA, NusaBali

Pemeliharaan atau perbaikan jalan dari Takmung –Lepang, tembus bypass Prof Ida Bagus Mantra, di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, diprotes warga. Warga menolak pemeliharaan jalan itu karena kualitasnya buruk. Pemeliharaan masih memakai pasir split untuk menambal bagian-bagian jalan yang rusak, bukan hotmix.

Kepala Dusun Losan I Wayan Suwitana mengaku prihatin dengan hasil pemeliharaan tersebut. "Sudah ada warga kami yang mengalami kecelakaan terpeleset karena serakan split," ujar Suwitana, Jumat (18/9).

Dia menganggap perbaikan ini aneh karena seharusnya berhotmix, namun hanya ditaburi aspal dan pasir. Harusnya, lapisan pasangan batu ditumpuk hotmix sehingga jalan tidak licin. Warga menilai kondisi aspal jalan Takmung - Lepang sekitar 3 Km, relatif bagus. Kerusakan atau pun lubang-lubang, tidak banyak, sehingga masih layak dan nyaman.

Suwitana, mengaku tak tahu pihak yang mengerjakan perbaikan ruas jalan tersebut. Plt Kadis PU Klungkung I Ketut Suayadnya, tak bisa diminta konfirmasinya terkait pemerliharaan jalan jurusan Takmung-Lepang. Plt yang sehari-hari Asisten II Pemkab Klungkung, Jumat (18/9) sedang sibuk terkait pernikahan anaknya.

Kabid Bina Marga Anak Agung Gede Lesmana, ponselnya menunjukkan sinyal tak aktif saat dihubungi. Sedang dari pantauan lapangan, perbaikan jalan Takmung- Lepang, baru sampai di depan Banjar Losan, Desa Takmung. k17

Edisi : Sabtu, 19 September 2015

Hal : 6